

## PATTIRO Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Ekologi

Citra Andita<sup>1,\*</sup>, Dwi Ayu Setiani<sup>2</sup>, Khaerul Umam Noer<sup>3</sup>, Alvika Meta Sari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>4</sup>Teknik Kima, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[\\*alvika.metasari@umj.ac.id](mailto:*alvika.metasari@umj.ac.id)

[\\*umam.noer@umj.ac.id](mailto:*umam.noer@umj.ac.id)

### ABSTRAK

PATTIRO adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi dan analisis kebijakan dimana PATTIRO kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintahan dalam memperbaiki pelayanan publik hingga pada pengelolaan anggaran publik, salah satunya adalah dalam bidang ecologic fiscal transfer (EFT). Tujuan dari kegiatan analisis EFT ini digunakan sebagai bahan analisis bagi daerah yang telah menerapkan skema EFT dengan baik sehingga dapat menjadi kerangka acuan untuk daerah lain yang belum dan ingin menerapkan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan berkomunikasi secara intensif dengan lembaga swadaya masyarakat pendamping daerah yang telah menerapkan EFT. Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkan informasi yang cukup lengkap untuk analisis bagaimana implementasi penerapan EFT di daerah namun ada kendala terkait komunikasi kepada mitra yang cukup lamban dalam merespon.

**Kata kunci:** magang, EFT, PATTIRO

### ABSTRACT

*PATTIRO is an institution engaged in advocacy and policy analysis where PATTIRO often provides technical assistance to the government in improving public services to managing public budgets, one of which is in the field of ecologic fiscal transfer (EFT). The purpose of this EFT analysis activity is to use it as an analytical material for regions that have implemented the EFT scheme well so that it can be a frame of reference for other regions that have not and want to implement it. The implementation of the activity begins with intensive communication with the local assisting non-governmental organizations that have implemented EFT. The result of this activity is that quite complete information is obtained for analysis of how the implementation of EFT is implemented in the regions, but there are obstacles related to communication to partners who are quite slow in responding*

**Keywords:** Internship, EFT, PATTIRO

### 1. PENDAHULUAN

Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, program Pengalaman Lapangan (Magang) merupakan sebuah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*) Sumardiono (2014: 116).

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa

harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta adalah organisasi non pemerintah yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal, Lebih dari 17 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kantor PATTIRO berada di Kecamatan Pasar Minggu yang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Administrasi

Jakarta Selatan. Nama kecamatan ini diambil dari nama Pasar Minggu yang ternama tersebut.

Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu, program Pengalaman Lapangan (Magang) merupakan sebuah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*) Sumardiono (2014: 116).

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta adalah organisasi non pemerintah yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal, Lebih dari 17 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kantor PATTIRO berada di Kecamatan Pasar Minggu yang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nama kecamatan ini diambil dari nama Pasar Minggu yang ternama tersebut.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan program diawali dengan pembagian peran untuk penanggung jawab masing-masing kabupaten yang akan dilakukan analisis Transfer Kabupaten Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE).



**Gambar 1.** Meeting perdana pengenalan kebijakan Ecologi Fiscal Transfer (EFT)



**Gambar 2.** Presentasi hasil data yang sudah didapatkan dari masing-masing kabupaten

Kegiatan diskusi dimulai di Kantor PATTIRO dihadiri oleh Program Manager dan Pemegang, diawali dengan menjelaskan tentang adanya Kebijakan EFT yang sudah mulai diimplementasikan pada 13 wilayah Kabupaten di Indonesia sejak tahun 2019

Didalam kegiatan diskusi pemegang mendapatkan peran masing-masing sebagai penanggung jawab dalam mencari data dan menghubungi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping di daerah

Mitra pendamping terdiri daerah yang terlibat dalam kegiatan EFT bersama dengan Pattiرو antara lain Jari Borneo, Pinus Sulawesi Selatan, Sekola Mombine Sulawesi Selatan, FITRA Riau, PLH Kalimantan Utara, The Asia Foundation

No	Kabupaten	Regulasi terkait TAKE
1	Jaya Pura	Peraturan Bupati Jayapura No. 6 Tahun 2021
2	Kubu Raya	Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2021
3	Sanggau	Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021
4	Nunukan	Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019
5	Bener Meriah	Pertairan Bupati Bener Meriah No. 30 Tahun 2020
6	Aceh Barat Daya	Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022
7	Siak	Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 Tentang siak Hijau
8	Bengkalis	Peraturan Bupati Bengkalis No. 65 Tahun 2021
9	Maros	Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2021
10	Toli-Toli	Peraturan Bupati Toli-Toli No. 1 Tahun 2022
11	Pare-Pare	Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022
12	Sigi	Peraturan Bupati Sigi No. 9 Tahun 2021

Sumber : modifikasi penulis, 2022

Pencarian data yang sudah didapatkan melalui LSM pendamping, Regulasi Peraturan Bupati, Laporan kinerja daerah mengenai dampak dan perubahan setelah adanya kebijakan EFT yang diterapkan di kumpulkan di dalam satu dokumen *PowerPoint* yang kemudian di presentasikan didalam hasil laporan progress.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

#### Transfer Anggaran Kabupaten Daerah Berbasis Ekologi

Indikator ekologi utama yang dikonsepsi para pakar di Indonesia adalah ukuran kinerja pelestarian kawasan hutan dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS). masing-masing kabupaten memiliki regulasi terkait anggaran dalam ekologi dengan besaran anggaran dari daerah berbeda-beda berdasarkan kinerja daerah dalam pengeolaan lingkungan.

Dana Insentif Daerah (DID) mulai mengadopsi indikator kinerja ekologi pada tahun 2019. Landasan yuridis yang dipijak dalam perumusannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dengan dasar hukum inilah dikembangkan berbagai skema transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer, EFT) untuk diaplikasikan di berbagai instrumen dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan alokasi Dana Desa (DD).

#### PEMBAHASAN

#### Dampak adanya kebijakan TAKE

Adanya kebijakan anggaran berbasis ekologi di setiap kabupaten telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja kabupaten tersebut. Kabupaten dengan indikator kinerja pengelolaan yang tinggi mendapatkan dana insentif juga untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kepala daerah

Menuet Saputra et al (2020) Transfer fiskal berbasis ekologi terbagi dalam 2 indikator yaitu Indikator Sosial Ekologis dan Indikator Berdasarkan Yurisdiksi. yang mana pada indikator sosial ekologis terbagi lagi menjadi dua yaitu :

- Indikator ekologi : pelestarian kawasan hutan, dan konsergasi daerah aliran sungai

- Indikator sosial ekonomi

#### Dampak Take Bagi Kabupaten

Kabupaten yang menerapkan TAKE secara baik tidak hanya terlihat dari insetif anggaran yang didapat, namun juga dari pengelolaan lingkungan yang baik

##### 1) Kabupaten Bener Meriah

TAKE atau Dana Insentif Kampung (Depik) yang diberikan kepada pemerintah kampung dalam Kabupaten Bener Meriah yang mampu mengelola Dana Desanya dengan baik (Dinas Pertanian dan pangan kabupaten bener meriah , 2021). Yang mana pada indikator kinerja di dalam aturan DEPIK menyangkut pelestarian lingkungan hidup sekala gampong (DLHK Aceh , 2019), dengan adanya TAKE di kabupaten Bener Meriah telah meningkatkan inobasi pemerintah daerah dalam bidang lingkungan.

##### 2) Kabupaten Bengkalis

Bengkalis merupakan daerah yang berada di provinsi Riau yang telah menerapkan skema TAKE di daerah. Dampak adanya Take yang dilakukan di kabupaten Bengkalis tidak jauh berbeda dengan Bener Meriah dimana telah ada peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam perlindungan lingkungan.

##### 3) Kabupaten Aceh Barat Daya

Komitment kepala daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk optimis dalam menerapkan TAKE di daerahnya. Aceh Barat Daya Memiiliki peran penting bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati dimana terdapat 85% wilayah berada dalam kawasan Ekosistem

Leuser (KEL) yang merupakan kawasan konservasi penting yang telah di ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO (**Ramli, 2022**). Adanya kebijakan TAKE telah meningkatkan tutupan lahan di area HPL.

##### 4) Kabupaten Siak

Take yang telah diterapkan di Kabupaten Siak telah memberi dampak pada peningkatan kinerja lingkungan dengan target yang dicapai. Ukuran kinerja di lihat berdasarkan perlindungan lingkungan dan ekonomi yang masing-masing memuat indikator kebijakan, alokasi anggaran, dan inovasi

##### 5) Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya merupakan bagian dari

kalimantan Barat. Skema insentif TAKE telah berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat perkembangan ekonomi masyarakat setempat yang disebabkan oleh formulasi insentif yang dibangun berangkat dari keselarasan kebijakan, mulai dari perencanaan yang bersifat makro hingga kebutuhan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan kemajuan ekonomi warga Kubu Raya

#### 6) Kabupaten Jaya Pura

Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis di Jayapura berdampak positif pada pelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pasalnya di Kabupaten Jayapura juga melakukan program Kolaborasi Multi Pihak. Inisiatif TAKE dipergunakan untuk program revitalisasi perkebunan kakao yang kini panen yang dihasilkan mencapai satu ton per kampung selama satu minggu. Sekarang, hampir setiap kampung memiliki kebun kakao dengan luas lebih dari 1 hektar.

#### 7) Kabupaten Nunukan

Skema TAKE Kabupaten Nunukan dilakukan melalui reformulasi bantuan keuangan kepada desa dengan menambahkan indikator pengelolaan ekologi berupa Membiayai kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan layanan dasar, penanggulangan kemiskinan desa, peningkatan ekonomi kelompok masyarakat berbasis ekowisata, perhutanan sosial dan potensi ekonomi desa yang relevan serta perlindungan lingkungan hidup tingkat desa.

#### 8) Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan lingkungan. Komitmen tsb terwujud dalam berbagai inovasi salah satunya dengan TAKE, skema yang digunakan berbasis kinerja yang menguatkan dari aspek lingkungan dan skema inilah yang mumpuni sehingga desa berkewajiban untuk memastikan dirinya menganggarkan bagaimana pengamanan dan penguatan lingkungan desa mereka.

#### 9) Kabupaten Maros

Implementasi terhadap kebijakan TAKE yang ada di kabupaten Maros ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam rangka memberikan

solusi mengenai menurunkan dan mengatasi berbagai macam ancaman ekologis seperti banjir, terbatasnya kesediaan air bersih, serta adanya kebakaran hutan dan lahan.

#### 10) Kabupaten Sigi

Adanya TAKE di kabupaten sigi ini karena dianggap memiliki lokasi dan kondisi geografis yang strategis namun juga di sigi terdapat banyak lokasi yang harus dijaga kelestariannya selain itu mengapa akhirnya TAKE ini terbentuk juga salah satunya karena didalamnya terdapat turunan pelaksanaan dari adanya sigi hijau yang nantinya akan ada regulasi yang akan dibuat guna tetap melestarikan sekaligus sebagai mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah.

#### 11) Kabupaten Toli-Toli

Tujuan diadakannya TAKE di kabupaten Tolitoli adalah sebagai simultan bagi desa dalam memperbaiki kinerja dan sebagai bentuk dari adanya komitmen pemerintah Tolitoli terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan dan kesiapsiagaan bencana

Mekanisme kebijakan TAKE merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan termasuk dalam komitmen PATTIRO dalam mewujudkan visi yaitu menjadi pusat keunggulan untuk tata kelola pemerintahan yang baik termasuk salah satunya adalah tata kelola berbasis lingkungan

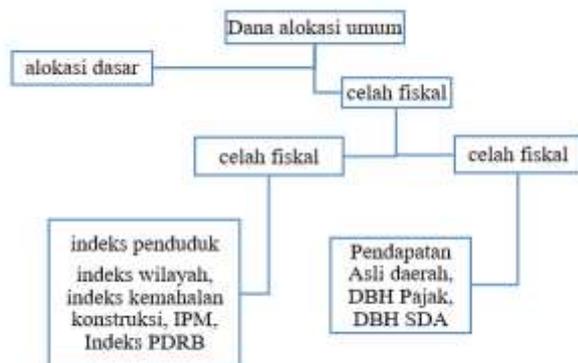
Skema transfer fiskal antar pemerintahan Indonesia telah mencoba memasukan indikator ekolgi dalam berbagai bentuk. Dalam konsep TAKE, besaran alokasi transfer anggaran dari Kabupaten atau kota ke desa, kampung atau kecamatan yang harus didasarkan pada indikator ekologi yang ditargetkan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidupnya.

Sejak tahun 2009 usulan mengenai memasukan variable luas tutupa hutan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) telah ada. Kemudian, padan tahun 2018-2019 wacana tersebut berkembang kembali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mumbunan (2018) dan Nurfatriani (2015) menunjukkan bahwa tutupan hutan yang semakin luas di dalam suatu daerah justru pendapatan asli daerah dan pendapatan dari dan perimbangan semakin rendah. Maka, hal tersebut yang melatarbelakangi usulan untuk memberi insentif bagi daerah yang memiliki tutupan

hutan yang luas berdasarkan dengan kinerja daerah tersebut.

Sifat DAU merupakan block grant dan daerah memiliki fleksibilitas yang besar untuk mengalokasikan penggunaannya. Karena sifatnya fleksibel maka DAU dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung upaya perlindungan hutan hanya jika pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian daerah

Dengan adanya alokasi khusus kinerja bagi daerah dalam skema TAKE maka ini menjadi suatu momentum bagi daerah yang belum menerapkan TAKE di daerahnya dapat ikut berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengolahan lingkungan yang lebih baik seperti pada kabupaten yang telah mendapatkan insentif fiskal berbasis ekologi lebih dahulu



Sumber : Mumbunan (2018)

Menurut Fitri et al (2020) Dalam penerapan DAU sebagai insentif ada kelebihan maupun kekurangan. Beberapa kelebihanannya antara lain :

- Daerah memiliki diskresi yang cukup besar untuk menentukan tujuan DAU
- Jumlah relatif besar
- Fleksibel untuk mendanai kegiatan daerah secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya perlindungan hutan
- Keberlanjutan dan kepastian keuangan daerah lebih pasti karena unsur-unsur dalam perhitungan DAU jarang berubah kecuali pembobotannya
- Memberikan tambahan dana baru dari pemerintah pusat bagi daerah, bukan realokasin dari dana yang sudah diperoleh
- Jika indikator luas tutupan hutan digunakan akan menjadi insentif bagi daerah “hijau”
- Kemudahan penerapan tinggi karena sudah

dioperasionalkan secara regular

Selain ada kelebihan juga ada kekuarangan antara lain yaitu :

- Daerah bersifat Block Grand sehingga peruntukannya untuk pelestarian hutan tidak spesifik
- Pengalokasian DAU berdasarkan pada kebutuhan fiskal dan celah fiskal. Kebutuhan fiskal adalah untuk membiayai kebutuhan publik sehingga tambahan dana dari insentif tutupan hutan seharusnya dikembalikan untuk membiayai hutan
- Terdapat peluang terjadinya double counting karena hutan sudah masuk dalam indikator wilayah jika indikator tutupan hutan dimasukan dalam perhitungan alokasi DAU
- Prinsip alokasi DAU adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah bukan untuk pemberian dana tambahan bagi daerah atas kinerja tertentu.

#### Peran PATTIRO

Sebagaimana peran sebuah organisasi terutama organisasi yang bergerak dibidang kebijakan publik, maka PATTIRO turut serta dalam kegiatan advokasi kebijakan TAKE di Indonesia. Sesuai dengan misi PATTIRO yaitu; mendorong terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara adil dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan advokasi anggaran publik; memperkuat kapasitas masyarakat, warga, dan aparatur pemerintah dalam pembuatan keputusan publik yang partisipatif dan berkualitas; serta mengembangkan model tata pemerintahan lokal yang baik untuk terwujudnya keadilan sosial maka melalui program TAKE yang saat ini sedang dijalankan PATTIRO turut serta dalam proses pengawasan program TAKE bersama dengan NGO lain yang memiliki tujuan yang sama yang dalam program tersebut.

#### 4) KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan di Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) kami banyak melakukan riset mengenai anggaran terutama pada anggaran berbasis lingkungan salah satunya program Ecologic Fiscal Transfer (EFT). Pada pelaksanaannya kami mendapat banyak tantangan untuk melakukan analisis kebijakan yang akan di implementasikan di daerah yang

mana kebijakan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kami juga telah mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru terkait teori yang telah kami dapatkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan praktiknya di lapangan terutama pada bidang mata kuliah analisis kebijakan publik

Adapun dalam kendala yang kami dapatkan ketika dilapangan adalah Kendala yang dihadapi pada saat menghubungi CSO dalam meminta data daerah yang menerapkan kebijakan EFT, pihak CSO menanggapi secara telat dan harus difollowup selalu. Lalu ada beberapa peraturan bupati yang tidak lengkap pada bagian lampiran pembagian alokasi dana desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pertanian dan pangan kabupaten bener meriah . (2021, april 30). *Bener Meriah Ciptakan Inovasi "Depik"*. Retrieved from Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah : <https://dinpertanianpangan.benermeriah.kab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/bener-meriah-ciptakan-inovasi-depik>
- DLHK Aceh . (2019, agustus 30). *Indikator Kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi Di Bener Meriah Mulai Dirumuskan* . Retrieved from Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan: <http://www.dlhk.acehprov.go.id>
- Laksana , S., & Gustav, T. I. (2022). Mengagas Indikator Kinerja Agroekologi Sebagai Inovasi Kebjiakan Alokasi Dana Insentif Daerah . *Working Papers* , 18-30.
- Nugraha , R. (2022). *Pattiro dorong insentif fiskal bagi daerah yang menerapkan regulasi take/tape*. Retrieved from PATTIRO Synergy For Change: <http://www.pattiro.org>
- Nurfitriani , F., Salminah , M., Rochmayanto , Y., Sari , G. K., & Kurniasari, D. R. (2020 ). *Konsep Kebijakan Transfer Bebasis Ekologi* . Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Pemerintah Indonesia . (2020). *Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung Kabupaten Bener Meriah* . Bener Meriah : Sekretaris Daerah Kabupaten .
- Pemerintah Indonesia . (2021). *Peraturan Bupati Bengkalis Nomo 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis* . Bengkalis : Sekretaris Daerah .
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau* . Siak: Sekretaris Daerah Kabupaten Siak .
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Bupati Nunukan No. 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan No 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa*. Nunukan : Sekretaris Daerah .
- Pemerintah Indonesia. (2021). *PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021*. Jayapura: Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Bupati Sanggau No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa DI Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021* . Sanggau : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau .
- Ramli, M. K. (2022, agustus 10). *Pemkab Aceh Barat Daya Adopsi Kebijakan TAKE* . Retrieved from BeritaBaru.co: <https://www.beritabar.co>